



EVALUASI KEPUASAN PERENCANAAN RUMAH DERET UNTUK PENANGANAN KAWASAN KUMUH CIKAPUNDUNG RW 11 TAMANSARI

Muhammad Ilham Nurtauhid

Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Institut Teknologi Nasional Bandung

E-mail: muhammadilham145785@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the relationship between the planned row housing development in Tamansari, Bandung, and the responses of the local community. With high population density and limited land, Bandung has seen a rise in informal settlements. The row housing, project, initiated by the Bandung city government, aims to improve these conditions without displacing residents, offering a five-year rent-free period. The study focuses on understanding the socio-economic conditions of residents along the Cikapundung River and their cognitive, affective, and conative responses to the project. Findings reveal both supportive and opposing views, highlighting potential impacts on the social and economic dynamics of the community. This research aims to provide insights for more responsive urban planning that addresses local needs and fosters sustainable urban environments.

Keywords: Row housing, Informal settlement, Community response, Socio-economic conditions, Cognitive, affective, conative response, Sustainable urban planning

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan dalam implementasi rencana pembangunan rumah deret di Tamansari, Bandung, dengan fokus pada respons masyarakat setempat. Kota Bandung menghadapi masalah kepadatan penduduk dan permukiman informal yang terus meningkat, sehingga pemerintah menginisiasi proyek rumah deret untuk meningkatkan kualitas kawasan tanpa menggusur warga, dengan menawarkan masa sewa gratis selama lima tahun pertama. Studi ini mengeksplorasi kondisi sosial ekonomi warga di sepanjang Cikapundung, serta respons kognitif, afektif, dan konatif mereka terhadap proyek ini. Hasil penelitian menunjukkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun menolak, yang mencerminkan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan bagi perencanaan kota yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Rumah deret, Permukiman informal, Respons masyarakat, Kondisi sosial ekonomi Respons kognitif, afektif, konatif, Perencanaan kota berkelanjutan

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism Checker No
237.u873247.fh8374

Copyright : Author

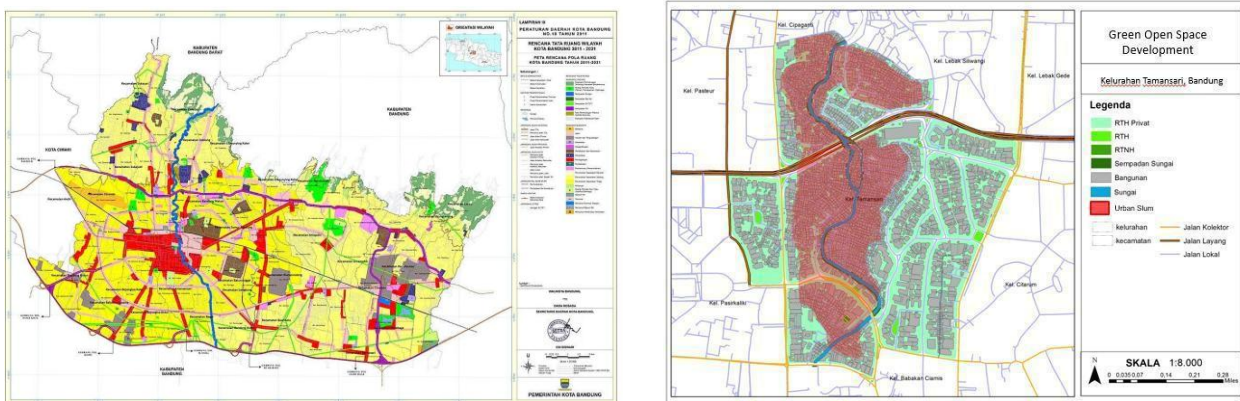
Publish by : Musytar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, dengan total penduduk sekitar 260 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2016). Tingginya angka pertumbuhan penduduk ini menimbulkan berbagai tantangan bagi kota-kota besar di Indonesia, salah satunya adalah keberadaan permukiman kumuh. Permukiman kumuh sering kali dikaitkan dengan kualitas lingkungan yang rendah dan dianggap sebagai bagian kota yang perlu diperbaiki atau direlokasi. Wilayah yang dikenal sebagai slum area ini sering dipandang sebagai sumber masalah perkotaan, seperti kejahatan dan masalah kesehatan. Dalam kerangka kebijakan pembangunan berkelanjutan, instrumen tata ruang memegang peran penting dalam menyelaraskan kepentingan pembangunan antara pusat dan daerah serta antar sektor secara harmonis dan terpadu untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul seiring dengan urbanisasi yang pesat.



Gambar Penentuan lahan di Kelurahan Tamansari

(Sumber : RTRW Kota Bandung Tahun 2011)

Perluasan wilayah perkotaan di Bandung, khususnya di kawasan RW 11 Kelurahan Tamansari, telah menyebabkan perubahan signifikan pada tata ruang kota, salah satunya dengan meningkatnya jumlah permukiman kumuh akibat terbatasnya lahan yang layak untuk hunian. Kepadatan penduduk yang tinggi memaksa banyak masyarakat untuk mendirikan pemukiman di atas lahan marginal, yang selanjutnya memunculkan berbagai permasalahan sosial dan lingkungan. Sebagai upaya mengatasi isu tersebut, Pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan rumah deret di kawasan tersebut melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan tujuan menyediakan hunian yang layak sekaligus mendukung pelestarian lingkungan. Namun, proyek ini memicu konflik antara pemerintah dan warga RW 11, terutama terkait klaim kepemilikan lahan dan ketidakpuasan terhadap nilai kompensasi yang ditawarkan. Proses sosialisasi yang dinilai tidak merata dan kurang transparan.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Rumah Deret

Rumah deret adalah jenis perumahan yang terdiri dari beberapa unit rumah yang dibangun secara berderet dan saling berdempetan, dengan desain seragam, dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan lahan di kawasan perkotaan yang terbatas. Konsep ini ideal diterapkan di kawasan permukiman padat atau kawasan kumuh, di mana keterbatasan ruang menjadi tantangan utama. Seperti yang dikemukakan oleh Santoso (2007), rumah deret merupakan solusi untuk memperkenalkan penggunaan lahan yang efisien, sambil tetap menjaga privasi penghuni. Meskipun rumah deret membangun unit-unit yang



berdempetan, desainnya tetap memperhatikan pemisahan ruang antar unit, sementara kedekatan fisik antar unit mendorong interaksi sosial yang lebih erat di antara penghuni. Oleh karena itu, rumah deret tidak hanya menjawab kebutuhan akan hunian yang efisien, tetapi juga dapat membantu menciptakan komunitas yang lebih kohesif dan berinteraksi sosial lebih intens.

Namun, penerapan rumah deret dalam kawasan kumuh menghadapi berbagai tantangan, seperti kepadatan hunian yang dapat memengaruhi kualitas hidup penghuni serta keterbatasan ruang terbuka hijau dan fasilitas umum yang sering ditemukan di kawasan tersebut. Zuraída (2013) menyatakan bahwa kawasan permukiman yang berkembang secara tidak teratur seringkali memerlukan perencanaan yang cermat untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi lahan dan kenyamanan penghuni. Oleh karena itu, penting bagi perencana untuk memastikan bahwa rumah deret tidak hanya efisien dalam penggunaan lahan, tetapi juga mendukung pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan desain yang tepat dan perhatian terhadap fasilitas bersama, rumah deret dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan sambil meningkatkan kualitas hidup penghuni di kawasan yang membutuhkan revitalisasi.

2.2 Kawasan

Kawasan didefinisikan sebagai ruang geografis dengan fungsi tertentu yang diatur untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Menurut Pedoman PNPM Mandiri Perkotaan (2012), kawasan permukiman yang berkelanjutan harus mengintegrasikan perlindungan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pengembangan ekonomi komunitas.

Dalam konteks perumahan, kawasan permukiman kumuh, seperti di Tamansari, memerlukan pengelolaan yang memperhatikan daya dukung ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Zuraída (2013) menyatakan bahwa kawasan permukiman sering kali menjadi tidak teratur akibat pembangunan yang tidak terencana. Tamansari RW 11 menjadi kawasan permukiman dengan infrastruktur minim, seperti jalan sempit, sanitasi buruk, dan akses air bersih yang terbatas. Meskipun dianggap kumuh, kawasan ini tetap memiliki nilai strategis karena kedekatannya dengan pusat kota, menjadikannya lokasi yang penting untuk revitalisasi.

2.3 Pengelolaan Lingkungan Perkotaan dan Perumahan

Pengelolaan lingkungan perkotaan dan perumahan menjadi isu yang semakin penting seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi di kota-kota besar. Di kawasan perkotaan, peningkatan jumlah penduduk sering kali berbanding terbalik dengan ketersediaan ruang dan infrastruktur yang memadai. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah seperti kemacetan, polusi, kekurangan air bersih, serta perumahan yang tidak teratur atau kumuh. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik menjadi salah satu kunci dalam menciptakan kehidupan perkotaan yang berkelanjutan.

Menurut Soemarno (2015), pengelolaan lingkungan perkotaan mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, pengelolaan air, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Semua aspek ini saling terkait dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik bagi penghuni kota. Dalam konteks perumahan, pengelolaan yang tepat dapat membantu mencegah masalah-masalah lingkungan yang sering muncul akibat pertumbuhan perumahan yang tidak terencana.

Perencanaan perumahan yang berkelanjutan perlu mempertimbangkan efisiensi penggunaan lahan, pengelolaan air, serta pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, konsep "green architecture" atau arsitektur hijau sering digunakan sebagai pendekatan dalam mendesain perumahan, yang tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga dampak lingkungan



yang minimal. Sebagai contoh, penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, serta sistem pengelolaan air hujan menjadi elemen penting dalam desain perumahan berkelanjutan (Setiawan, 2018).

2.4 Cognitive-Affective-Conative (CAC) Model

Teori Cognitive-Affective-Conative (CAC) Model diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen pada tahun 1975 melalui Theory of Planned Behavior. Teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana manusia merespons suatu pengalaman berdasarkan tiga domain utama, yaitu kognitif (pemikiran), afektif (perasaan), dan konatif (tindakan). Model ini sering digunakan dalam penelitian yang berfokus pada analisis respons pengguna terhadap suatu produk, layanan, atau intervensi, termasuk dalam konteks perumahan dan pembangunan perkotaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu metode yang bertujuan memperoleh data deskriptif dari fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami berbagai aspek subjektif yang dialami oleh partisipan, seperti perilaku, persepsi, dan motivasi mereka. Lokasi penelitian berada di RW 11 Kelurahan Tamansari, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis difokuskan pada hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan penerimaan terhadap proyek rumah deret.

Tabel 1. Desain Metode Penelitian

Langkah	Teknik Pengumpulan Data	Instrumen Penelitian	Tujuan
1. Observasi	Observasi langsung terhadap aktivitas warga dan lingkungan	Panduan Observasi	Mengidentifikasi pola interaksi sosial dan dampak proyek rumah deret terhadap kehidupan warga.
2. Wawancara	Wawancara mendalam dengan warga terdampak	Panduan Wawancara	Memahami persepsi, kebutuhan, dan tingkat kepuasan warga terhadap proyek. Memperoleh informasi kebijakan dan kendala implementasi proyek rumah deret.
3. Dokumentasi	Analisis dokumen perencanaan dan laporan proyek.	Dokumen proyek (desain, laporan sosialisai, kebijakan)	Mengevaluasi Tingkat keterbukaan, transparansi, dan pelaksanaan proyek rumah deret.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Observasi

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat RW 11 Tamansari memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap lingkungan sekitar, termasuk keberadaan Sungai Cikapundung. Sebagian besar warga bekerja di sektor informal dengan pendapatan



yang tidak tetap, yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Dalam kondisi ini, rencana pembangunan rumah deret yang ditawarkan pemerintah dianggap sebagai upaya positif untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun, berdasarkan wawancara, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan nilai sewa yang diberlakukan setelah masa gratis lima tahun akan memberatkan ekonomi keluarga, terutama bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah.

3.2 Implementasi Program Rumah Deret

Implementasi proyek rumah deret di RW 11 Tamansari melibatkan berbagai dinamika yang mencakup konflik, negosiasi, dan adaptasi. Konflik utama yang muncul dalam proyek ini berkaitan dengan perbedaan persepsi antara warga dan pemerintah mengenai kepemilikan lahan dan nilai kompensasi. Warga merasa bahwa nilai kompensasi yang dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak mencerminkan harga pasar yang sebenarnya, sementara pemerintah berpendapat bahwa penawaran tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perbedaan pandangan ini menjadi sumber ketegangan yang mempengaruhi jalannya proyek.

Negosiasi antara pemerintah dan warga dilakukan melalui serangkaian sosialisasi dan pertemuan komunitas. Namun, banyak warga yang merasa bahwa proses tersebut tidak berjalan dengan transparan dan tidak melibatkan semua pihak secara merata. Beberapa warga bahkan memilih untuk mengajukan gugatan hukum sebagai bentuk protes terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sayangnya, hasil dari proses hukum ini tidak selalu memuaskan bagi kedua belah pihak, menciptakan ketidakpuasan yang berkepanjangan.

3.3 Respons Kognitif, Afektif, dan Konatif Masyarakat terhadap Proyek

3.3.1 Respons Kognitif

Sebagian warga memahami tujuan pemerintah untuk menata kawasan permukiman kumuh dan menyambut baik rencana tersebut. Namun, pemahaman ini sering kali terbatas karena kurangnya informasi yang merata. Berdasarkan wawancara, banyak warga mengaku hanya menerima informasi dari sosialisasi yang tidak komprehensif, sehingga muncul berbagai spekulasi terkait kepemilikan lahan dan nilai kompensasi yang ditawarkan.

3.3.2 Respons Afektif

Perasaan masyarakat terhadap proyek rumah deret sangat beragam. Sebagian merasa optimis karena proyek ini menawarkan hunian layak dengan masa sewa gratis selama lima tahun pertama. Namun, rasa kecewa dan kekhawatiran muncul dari mereka yang merasa tidak terlibat secara aktif dalam proses perencanaan. Hal ini diperparah dengan konflik mengenai status lahan yang dianggap sebagai aset daerah oleh pemerintah, tetapi diyakini sebagai milik pribadi oleh warga.

3.3.3 Respons Konatif

Setelah pembangunan rumah deret selesai, respons warga mencerminkan penerimaan yang terbatas. Meskipun pemerintah memberikan kompensasi selama proses relokasi, tingkat hunian tetap rendah. Dari total kapasitas 191 KK, hanya sekitar 10 KK yang telah menempati rumah deret. Warga yang belum menempati unit mengungkapkan kekhawatiran terkait keberlanjutan finansial dan sosialisasi pasca-proyek. Pemerintah perlu memberikan dukungan tambahan, seperti pendampingan dan program adaptasi, untuk meningkatkan tingkat hunian dan keberhasilan program secara keseluruhan.

3.4 Evaluasi Implementasi Program Rumah Deret

Berdasarkan analisis dokumen, pembangunan rumah deret melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) belum sepenuhnya memenuhi prinsip keterlibatan publik yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pemerintah Kota Bandung tidak berhasil memastikan proses sosialisasi yang menyebabkan munculnya ketimpangan pemahaman antara warga dan pemerintah. Selain itu, metode penetapan kompensasi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang jauh di bawah harga pasar menciptakan ketidakpuasan warga. Metode ini dianggap mengabaikan kondisi ekonomi warga yang memerlukan dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak di masa transisi.

Namun dengan segala tantangan dalam implementasi rumah deret, kini masyarakat mulai memberikan respon positif karena konsistensi dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak, terbukti dengan kompensasi berupa biaya bulanan yang diterima warga dalam kurun waktu 6 tahun selama masa pembangunan Rumah Deret.

Berdasarkan hasil wawancara, selama proses relokasi pihak warga diberikan kompensasi untuk bertahan hidup selama pembangunan berlangsung, warga mengaku senang dengan kebijakan ini walau proses pembangunan tergolong lama hingga memakan waktu sekitar 5-6 tahun (di luar tenggat waktu yang dijanjikan pemerintah). Setelah pembangunan selesai belum terlalu banyak tipe hunian yang terisi, terhitung saat penulis mengolah laporan berkisar 10 kk yang mengisi rumah deret tersebut kapasitas dimana Rumah Deret sendiri diperkirakan dapat menampung kurang lebih 191 KK.

3.5 Adaptasi Desain

Desain rumah deret Tamansari RW 11 mengutamakan efisiensi ruang, fleksibilitas, dan kenyamanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan penghuni. Proyek ini menawarkan dua tipe unit, tipe 33 dan tipe 39, yang dirancang dengan tata letak yang dapat disesuaikan, mencakup elemen-elemen seperti void, ramp, dan koridor double-loaded untuk memastikan pencahayaan alami, ventilasi silang, serta aksesibilitas yang inklusif. Laporan ini membahas penerapan desain yang mendukung keberlanjutan, kenyamanan, dan adaptasi terhadap konteks sosial-ekonomi masyarakat sekitar.



Gambar 3D dan tipe Layout Denah Rumah Deret RW 11

(Sumber : Akanoma-Pedoman Desain Rumah Deret Tamansari RW 11 03072017)

3.5.1 Tipe 33

Tipe 33 dirancang kompak namun fungsional, cocok untuk keluarga kecil atau individu. Ruang tamu menjadi area interaksi sosial utama, sementara dapur multifungsi mendukung aktivitas memasak efisien. Kamar tidur utama memberikan privasi, dan kamar tidur mezanin fleksibel untuk berbagai keperluan, seperti ruang kerja atau tidur anak. Kamar mandi dan gudang kecil menjaga kenyamanan dan kerapian. Desainnya mengutamakan pencahayaan alami dan ventilasi silang untuk kenyamanan penghuni, serta memungkinkan adaptasi ruang untuk usaha rumahan, seperti penjualan makanan atau produk lokal.



Gambar Tipe Denah 33

(Sumber : Akar Anomali)

3.5.2 Tipe 39 dan Tipe Warung

Tipe 39 menawarkan ruang lebih luas, cocok untuk keluarga yang membutuhkan fleksibilitas. Tipe warung adalah varian tipe 39 yang mengintegrasikan fungsi hunian dengan ruang usaha. Area ruang tamu yang multifungsi dapat diubah menjadi warung dengan dinding geser, menciptakan fleksibilitas penggunaan ruang. Teras kecil di bagian depan unit mendukung aktivitas komersial dengan area duduk untuk pelanggan atau tempat menampilkan barang dagangan.



Gambar Tipe Denah 39 /Tipe warung

(Sumber : Akar Anomali)

3.5.3 Sirkulasi

Ramp dalam desain kompleks permukiman mempermudah aksesibilitas, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan menciptakan ruang inklusif. Ramp dirancang untuk berbagai kelompok pengguna, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak. Elemen hijau seperti taman vertikal meningkatkan kualitas udara dan memberikan suasana sejuk. Ramp juga memperkuat interaksi sosial antar penghuni, dengan void yang memungkinkan sirkulasi udara yang optimal dan koneksi visual antar lantai.



Gambar Sirkulasi
(Sumber : detikJabar)

3.5.4 Void

Void merupakan elemen penting dalam desain yang mengoptimalkan pencahayaan alami, ventilasi, dan kenyamanan penghuni. Void mendukung keberlanjutan lingkungan dengan meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi efek pulau panas. Selain itu, void menjadi ruang sosial yang mendorong interaksi antar penghuni, menyediakan ruang berkumpul, dan koneksi visual antar lantai. Konsep void ini memperkaya pengalaman ruang sekaligus mendukung kesehatan mental penghuni.



Gambar Void
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024)

3.5.5 Konsep Double-Loaded Corridor

Konsep double-loaded corridor di rumah deret Taman Sari RW 11 mengoptimalkan penggunaan lahan dengan menempatkan unit hunian di kedua sisi koridor. Void

ditempatkan sepanjang koridor untuk memastikan pencahayaan alami dan ventilasi yang baik. Desain ini cocok untuk kawasan dengan keterbatasan lahan, memungkinkan lebih banyak unit ditempatkan tanpa mengorbankan kualitas sirkulasi udara dan pencahayaan alami.



Gambar Double-Loaded Corridor
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2024)

4. KESIMPULAN

Pembangunan rumah deret dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di RW 11, Kelurahan Tamansari, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan pemerintah dengan harapan masyarakat. Konflik terkait klaim lahan dan kebijakan kompensasi yang tidak memadai mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan dan implementasi proyek. Kurangnya transparansi, komunikasi, dan keterlibatan warga dalam tahap awal menyebabkan ketidakpercayaan terhadap hasil akhir pembangunan. Evaluasi ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sejak awal untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dapat memenuhi harapan warga dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara adil dan berkelanjutan. Pendekatan yang lebih terbuka dan dialog yang efektif akan mengurangi potensi konflik serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap proyek pembangunan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. T. Pramesti, "Hubungan Rencana Pembangunan Rumah Deret di Kota Bandung terhadap Respon Masyarakat di Kelurahan Tamansari," Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
- [2] I. M. Ihsan Nugraha, "Kajian Penanganan Permukiman Sempadan Sungai Cikapundung: Studi Kasus Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Tamansari," 2020.
- [3] Bandung Bergerak, "Tentang rumah deret yang vertikal itu." [Online]. Available: <https://bandungbergerak.id/article/detail/2445/tentang-rumah-deret-yang-vertikal-itu>. [Accessed: Jan. 14, 2025].
- [4] L. Arviansyah, "Evaluasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Cikapundung Kelurahan Tamansari," 2016.
- [5] I. Dwiputri, "Pemilihan Program Peremajaan yang Sesuai untuk Penyelesaian Persoalan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tamansari, Kota Bandung," 2009.
- [6] Pemerintah Kota Bandung, "Peraturan Perundang-undangan Daerah." [Online]. Available: <https://jdih.bandung.go.id/home/produk-hukum/peraturan-perundang->



undangan-daerah/2173. [Accessed: Jan. 14, 2025].

- [7] DetikJabar, "Penantian Panjang Siti untuk Tempati Rumah Deret Tamansari." [Online]. Available:

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-7636606/penantian-panjang-siti-untuk-tempati-rumah-d-eret-tamansari>. [Accessed: Jan. 14, 2025].

- [8] Akanoma Studio, "Pedoman Desain Rumah Deret Tamansari RW 11," 2017.

- [9] PRFMNews, "Bisa Tampung 191 KK, Rumah Deret Tamansari Bandung Sudah Mulai Disewa dan Ditempati Warga." [Online]. Available: <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-138796577/bisa-tampung-191-kk-rumah-deret-tamansari-bandung-sudah-mulai-disewa-dan-ditempati-warga>. [Accessed: Jan. 14, 2025].